

EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA BALONGMASIN KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO

Ika Ayu Nurrohmah

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
ikaaynur@gmail.com

Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah juga berupaya menanggulangi kemiskinan, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinaungi oleh Kementerian Sosial dan berlandaskan hukum pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Pelaksanaan PKH dimulai sejak tahun 2007, dan sebagian daerah baru menerima PKH pada tahun 2008, salah satunya yaitu Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Pungging terdiri dari 19 desa, salah satunya yaitu Desa Balongmasin. Pelaksanaan PKH di tersebut masih ditemui beberapa kendala yaitu persebaran bantuan yang belum merata, pola pikir masyarakat yang belum mandiri dan terdapat beberapa masyarakat yang belum memenuhi komitmen. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Evaluasi PKH di Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian Evaluasi PKH di Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto secara umum masih belum berhasil. Dari 6 (enam) indikator evaluasi, hanya pada indikator responsivitas yang memenuhi. Sedangkan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan dan ketepatan masih belum memenuhi. Saran untuk pelaksanaan PKH di Desa Balongmasin yaitu perlu adanya simulasi langsung tentang edukasi kewirausahaan agar masyarakat lebih tertarik untuk mempraktikkannya, perlu adanya inovasi penyampaian materi dalam kegiatan FDS agar tidak terkesan membosankan, perlu adanya jadwal yang terstruktur untuk kegiatan FDS, perlu adanya pembaruan data peserta PKH yang sesuai dengan kondisi di lapangan, serta perlu adanya inovasi mengenai materi-materi yang disampaikan agar lebih bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan untuk kehidupan sehari-hari peserta.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, PKH

Abstract

Poverty is a phenomenon and social problem that continues to be a concern of the government. The government also seeks to tackle poverty, one of which is through the Hopefulness Family Program (PKH) which is sheltered by the Ministry of Social Affairs and based on the law in the Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 concerning the Hopefulness Family Program (PKH). The implementation of PKH began in 2007, and some new regions received PKH in 2008, one of which was Pungging District, Mojokerto Regency. Pungging District consists of 19 villages, one of which is Balongmasin Village. The implementation of the PKH still encountered several obstacles, namely the distribution of assistance that was not evenly distributed, the mindset of the people who were not yet independent and there were several communities who had not fulfilled the commitment. This study aims to describe the Evaluation of the PKH in Balongmasin Village, Pungging District, Mojokerto Regency. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The results of the study on the Evaluation of the PKH in Balongmasin Village, Pungging District, Mojokerto Regency, have generally not been successful. Of the 6 (six) evaluation indicators, only the indicators of responsiveness are fulfilling. While indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity and accuracy still do not meet. Suggestions for the implementation of PKH in Balongmasin Village are the need for a direct simulation of entrepreneurship education so that people are more interested in practicing it, the need for innovations in delivering material in FDS activities so that it doesn't seem boring, there needs to be a structured schedule for FDS activities. in accordance with the

conditions in the field, and the need for innovation regarding the material presented so that it can be more useful and can be practiced for the daily lives of participants.

Keywords: Evaluation, Policy, PKH

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus-menerus dikaji serta menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Salah satu faktor penyebab keteringgalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah karena tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dinilai dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh, sehingga kemiskinan juga merupakan muara dari masalah sosial lainnya (Purwanto dkk, 2013: 80).

Menurut Huraerah, kebijakan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dinilai telah mengalami beberapa kekeliruan paradigmatik. Pertama, masih berorientasi pada aspek ekonomi daripada aspek multidimensional. Penanggulangan kemiskinan dengan fokus perhatian pada aspek ekonomi terbukti mengalami kegagalan, karena pengentasan kemiskinan yang direduksi dalam soal-soal ekonomi tidak akan mewakili persoalan kemiskinan yang sebenarnya. Kedua, lebih bernuansa kemurahan hati dari pada produktivitas, padahal program penanggulangan kemiskinan seharusnya diarahkan supaya mereka menjadi produktif. Ketiga, memposisikan masyarakat miskin sebagai objek dari pada subjek. Keempat, pemerintah masih sebagai penguasa daripada fasilitator (Purwanto dkk, 2013: 80).

Bangun (2016: 2) menegaskan bahwa masalah kemiskinan adalah masalah multidimensi yang juga mengakibatkan gizi buruk dan anak-anak putus sekolah. Rendahnya kemampuan ekonomi sebuah keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM) membawa dampak pada buruknya nutrisi dan gizi, serta menyebabkan banyak anak yang tidak dapat melanjutkan pelajarannya di bangku sekolah. Sebagian di antaranya harus bekerja keras membantu mencari nafkah untuk keluarganya dan ada yang terpaksa menjadi anak jalanan. Semakin besar jumlah anak usia sekolah yang tidak mampu memperoleh pendidikan yang layak akan memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada masa yang akan datang dan mengakibatkan beban sosial yang sangat tinggi terhadap negara. Penanganan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia ini kemungkinan akan semakin sulit diatasi. Hal ini disebabkan karena sempitnya lapangan pekerjaan serta rendahnya pendapatan masyarakat miskin memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Selain itu, mahal biaya pendidikan menyebabkan masyarakat miskin semakin sulit untuk mengenyam dunia pendidikan yang pada akhirnya akan dapat menyebabkan turunnya kualitas

sumber daya manusia, maka hal ini juga diperlukan tentang adanya pemberdayaan dari keluarga.

Menanggapi pernyataan di atas, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program bantuan. Salah satunya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan bersyarat yang dinaungi oleh Kementerian Sosial. Program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2007. PKH membuka akses kepada keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak balita maupun anak usia sekolah untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya (<https://pkh.kemsos.go.id> diakses 9 Januari 2019).

Misi besar PKH adalah untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Dalam jangka pendek, dana bantuan tunai bersyarat diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung). Dalam jangka panjang, merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Sedangkan tujuan khusus PKH adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup Kelompok Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan (<https://pkh.kemsos.go.id> diakses 9 Januari 2019).

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan secara serentak se-Indonesia mulai tahun 2007 termasuk wilayah Kabupaten Mojokerto. Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan secara bertahap untuk semua kecamatan se-Kabupaten Mojokerto yang mana terdapat 18 kecamatan. Tahun 2007 terdapat 10 kecamatan yang menerima PKH, yaitu Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko, Kecamatan Gedeg dan Kecamatan Dawarblandong. Tahun 2008 penerima PKH ditambah 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pungging,

Kecamatan Mojosari, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Dlanggu dan Kecamatan Puri. Tahun 2009 penerima PKH ditambah lagi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Jetis, sehingga pada tahun 2009 semua kecamatan di Kabupaten Mojokerto sudah mendapatkan bantuan sosial PKH (<https://regional.kompas.com> diakses 9 Januari 2019).

Kecamatan Pungging merupakan salah satu kecamatan yang berhasil dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Kecamatan Pungging terbagi menjadi 19 desa, yaitu Desa Purworejo, Desa Mojorejo, Desa Curahmojo, Desa Sekargadung, Desa Tempuran, Desa Jatilangkung, Desa Banjartanggul, Desa Kalipuro, Desa Randuharjo, Desa Kembangringgit, Desa Pungging, Desa Lebaksono, Desa Tunggalpager, Desa Balongmasin, Desa Jabontegal, Desa Kedungmungal, Desa Watukenongo, Desa Ngrame, Desa Bangun. Keberhasilan Kecamatan Pungging terbukti dengan adanya masyarakat yang menyatakan graduasi atau berakhirnya masa kepesertaan PKH karena status ekonominya telah meningkat atau sudah tidak memenuhi kriteria kepesertaan PKH.

Peneliti justru memilih Desa Balongmasin karena terdapat beberapa masalah yang mengakibatkan PKH di desa tersebut belum cukup berhasil. Masalah yang pertama yaitu persebaran bantuan sosial PKH yang belum merata. Kemudian masalah yang kedua yaitu masih terdapat beberapa masyarakat yang belum memenuhi komitmen. Misalnya, setiap kali diadakan pertemuan PKH di desa selalu ada saja masyarakat yang tidak hadir. Kemudian masalah yang ketiga yaitu pola pikir masyarakat yang belum mandiri. Hal tersebut dimaksudkan bahwa masyarakat masih sangat bergantung pada bantuan yang diberikan. Bahkan beberapa masyarakat yang sudah mampu juga masih menikmati bantuan yang diterima.

Perlu diketahui bahwa proses graduasi atau berakhirnya masa kepesertaan PKH bisa melalui pemutakhiran sosial ekonomi atau juga alamiah. Graduasi berdasarkan pemutakhiran sosial ekonomi adalah masyarakat akan digraduasi karena telah mampu atau status ekonominya telah meningkat. Sedangkan graduasi alamiah adalah masyarakat akan diputus masa kepesertaan PKH-nya karena sudah tidak memenuhi kriteria, misalnya anak yang SMA sudah lulus sekolah dan tidak memiliki komponen lain seperti ibu hamil, balita dan/atau lansia (Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2017).

Berdasarkan pemaparan masalah-masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balongmasin adalah persebaran bantuan sosial PKH yang belum merata, masih terdapat beberapa masyarakat yang belum memenuhi komitmen dan pola pikir masyarakat yang

belum mandiri. Peneliti juga memilih untuk fokus pada bidang pendidikan karena hampir seluruh peserta PKH Desa Balongmasin adalah penerima komponen pendidikan. Oleh sebab itu, pemilihan Desa Balongmasin sebagai lokasi penelitian dirasa sudah tepat, sehingga perlu diadakan evaluasi mengenai PKH di desa tersebut. Mengingat bahwa program ini juga sudah dilaksanakan sejak lama, yaitu sejak tahun 2008.

Berdasarkan masalah yang telah diungkapkan, maka penelitian ini sesuai dengan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) indikator dalam mengevaluasi suatu kebijakan. Pertama efektivitas, yaitu mengenai apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Kedua efisiensi, yaitu mengenai seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil. Ketiga kecukupan, yaitu mengenai seberapa jauh pencapaian hasil dapat memecahkan masalah. Keempat pemerataan, yaitu mengenai apakah manfaat didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Kelima responsivitas, yaitu mengenai respon masyarakat terhadap bantuan yang diterima. Keenam ketepatan, yaitu mengenai apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan latar belakang adanya masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui, mendalami, dan menganalisis Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balongmasin dengan judul penelitian “Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah 6 (enam) indikator evaluasi menurut William N. Dunn (Dunn, 2003: 610). Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2008: 247-253).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan analisis Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan 6 (enam) indikator evaluasi menurut William N. Dunn (Dunn, 2003: 610). Model evaluasi tersebut meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan,

responsivitas dan ketepatan. Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut:

1. Efektivitas

Kriteria efektivitas berpedoman pada tujuan adanya kebijakan. Hasil dari pelaksanaan kebijakan diharapkan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga suatu kebijakan bisa dianggap efektif. Jika hasil dari pelaksanaan kebijakan belum mampu mencapai tujuan kebijakan, maka bisa disimpulkan bahwa masih terdapat masalah pada pelaksanaan suatu kebijakan. Sejak dilaksanakan mulai tahun 2008 sampai sekarang, pencapaian PKH di Desa Balongmasin khususnya bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan. Program Keluarga Harapan (PKH) memang memberikan bantuan uang dan juga edukasi untuk keperluan pendidikan. Hal tersebut tentu bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin peserta PKH yang memiliki anak usia sekolah agar bisa mengakses layanan pendidikan. Tujuan pertama ini telah terwujud di Desa Balongmasin. Masyarakat Desa Balongmasin telah merasa terbantu untuk menyekolahkan anaknya sampai tingkat SMA dengan dana bantuan PKH.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Pemberian bantuan sosial PKH telah terbukti mampu mengurangi beban pengeluaran KPM PKH Desa Balongmasin. Masyarakat peserta PKH telah merasakan keringanan pengeluaran biaya pendidikan anak mereka. Sehingga mereka bisa memiliki harapan lebih untuk menyekolahkan anak mereka sampai lulus SMA/MA atau sederajat. Bahkan akan lebih baik lagi apabila anak mereka termotivasi untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Selain itu, PKH juga memberikan edukasi tentang kewirausahaan yang mana bisa memberikan wawasan kepada KPM untuk memulai usaha. Jika KPM mau mempraktikkan materi kewirausahaan yang disampaikan, tentu bisa menambah penghasilan keluarga, akan tetapi hal tersebut masih belum terwujud di Desa Balongmasin. Masyarakat mengaku sulit untuk memulai usaha, sehingga mereka enggan menggunakan uang bantuan untuk memulai usaha. Masyarakat juga mengaku bahwa dana bantuan PKH yang terpenting adalah untuk anak sekolah.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan pendidikan. Bantuan sosial PKH merupakan bantuan sosial

bersyarat, yang mana bagi peserta PKH diwajibkan untuk memenuhi komitmen sesuai dengan komponen bantuan yang mereka terima. Apabila peserta tidak memenuhi komitmen mereka, maka bantuan yang diberikan akan ditanggguhkan atau bahkan sampai dicabut. Kewajiban tersebut tentu pada akhirnya akan menciptakan perubahan perilaku pada peserta PKH. Bagi peserta dengan komponen pendidikan yaitu anak usia sekolah, mereka memiliki kewajiban untuk mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif. Selain itu, bagi ibu-ibu peserta PKH juga diberikan edukasi pada kegiatan FDS PKH. Kegiatan tersebut mengajarkan pada orang tua agar bersikap baik kepada anak, sehingga anak tidak sampai merasa tertekan dan tetap semangat untuk belajar. Di Desa Balongmasin, hal tersebut sudah cukup terwujud, meskipun ada beberapa peserta yang sulit untuk diingatkan. Hampir semua peserta telah sadar bahwa kebutuhan pendidikan untuk anak itu juga penting agar masa depan mereka bisa lebih baik.

- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Tujuan keempat dari PKH ini masih belum terwujud di Desa Balongmasin. Masyarakat lebih terfokus pada biaya pendidikan anak. Sebagian besar dari mereka enggan menggunakan dana bantuan untuk membuka usaha yang mana bisa membantu mereka segera keluar dari garis kemiskinan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan PKH di Desa Balongmasin sudah cukup efektif dalam hal penanggulangan kemiskinan. Hanya saja penyampaian materi pada kegiatan FDS dinilai kurang efektif karena terkesan sedikit membosankan. Masyarakat hanya dimintai membaca dan mendengarkan materi yang disampaikan. Padahal, pendamping seharusnya juga bisa menyampaikan dengan cara yang sedikit berbeda, misalnya praktik langsung pada saat kegiatan. Misalkan pada materi “Cara Mengasuh Anak dengan Baik”, kita bisa meminta seorang peraga dari peserta, sebelum menyampaikan isi materi kita bertanya terlebih dahulu “Jika anak kita menangis karena bertengkar dengan saudaranya, apa yang akan ibu lakukan?”. Berdasarkan pertanyaan tersebut kita mungkin bisa tahu jawaban yang beragam, dan jika ada yang kurang tepat, kita bisa memberikan pengarahan yang benar. Kemudian cara yang kedua, pendamping juga bisa memberikan cerita-cerita motivator yang bisa memotivasi para orang tua agar mendukung anaknya untuk lebih semangat belajar.

2. Efisiensi

Kriteria efisiensi merupakan penilaian berdasarkan seberapa besar penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, semakin sedikit sumber daya yang digunakan, maka semakin efisien pelaksanaan suatu kebijakan. Pada pelaksanaan PKH di Desa Balongmasin, sumber daya yang diperlukan yaitu sumber daya manusia, sumber daya waktu dan sumber daya fasilitas.

a. Sumber Daya Manusia

Hasil evaluasi pada kriteria efisiensi sumber daya manusia yang digunakan dalam pelaksanaan PKH di Desa Balongmasin dinilai sudah mencukupi. Mengingat bahwa berdasarkan ketentuan Pedoman Pengelolaan SDM PKH Tahun 2017 jumlah rasio dampingan untuk setiap pendamping adalah antara 276 sampai 400 dampingan atau peserta, sedangkan di Desa Balongmasin peserta PKH berjumlah 93 peserta. Jadi bisa disimpulkan bahwa jumlah sumber daya manusia untuk pelaksanaan PKH di Desa Balongmasin sudah mencukupi.

b. Sumber Daya Waktu

Kegiatan FDS merupakan kegiatan rutin setiap bulan minimal sekali pertemuan. Kegiatan FDS harus tersampaikan semua materinya selama satu tahun, dan hal tersebut sudah mampu dilaksanakan oleh pendamping PKH Desa Balongmasin. Sayangnya kegiatan tersebut masih belum dijadwalkan dengan baik. Pemberitahuan kapan akan dilaksanakan FDS seringkali mendadak, yaitu H-1 pelaksanaan atau bahkan beberapa jam sebelum pelaksanaan. Hal tersebut tentu bisa mengganggu kegiatan lain, karena beberapa peserta PKH juga harus bekerja. Selain itu, dengan adanya jadwal yang terstruktur juga bisa memberikan kesempatan pada pendamping untuk mempersiapkan mengenai apa saja dan bagaimana materi FDS akan disampaikan. Bila perlu, masyarakat juga diberitahu materi apa yang akan disampaikan selanjutnya agar masyarakat juga bisa mempersiapkan barangkali ada hal yang ingin mereka tanyakan atau didiskusikan, dengan begitu kegiatan FDS bisa menjadi lebih maksimal.

c. Sumber Daya Fasilitas

Pada kriteria efisiensi yang terakhir yaitu efisiensi dalam penggunaan sumber daya fasilitas untuk pelaksanaan PKH di Desa Balongmasin. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada pelaksanaan PKH juga terdapat kegiatan FDS. Kegiatan tersebut berisi materi-materi yang mana sebagian besar fasilitasnya disediakan oleh pusat. Fasilitas tersebut terdiri dari flipchart, buku materi dan CD yang berisi video tentang materi. Semua

fasilitas tersebut sudah cukup efisien untuk menyampaikan materi-materi FDS. Sedangkan fasilitas penunjang seperti laptop merupakan fasilitas yang disediakan sendiri oleh pendamping. Fasilitas tersebut terkadang mengalami kendala, sehingga terkadang penyampaian materi hanya membaca-mendengarkan yang terkesan membosankan dan membuat penyampaian materi menjadi kurang efisien.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi pelaksanaan PKH di Desa Balongmasin masih hanya sebatas pemenuhan sumber daya manusia. Sedangkan pemenuhan sumber daya waktu dan fasilitas dinilai kurang efisien, sehingga berakibat kurang maksimalnya pelaksanaan PKH, khususnya dalam kegiatan FDS. Padahal kegiatan FDS juga penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar segera tercipta perubahan perilaku maupun sosial ekonomi.

3. Kecukupan

Kriteria kecukupan berkaitan dengan bagaimana hasil dari kebijakan dapat mengatasi masalah yang dialami masyarakat. Sehingga suatu kebijakan dapat dikatakan memenuhi kriteria kecukupan apabila hasil dari suatu kebijakan mampu mengatasi masalah yang ada sebelum kebijakan diterapkan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui PKH merupakan inovasi dari program bantuan sebelumnya yang dinilai kurang berhasil untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih maju. Kebijakan PKH juga bisa dikatakan memenuhi kriteria kecukupan apabila dengan adanya PKH tidak akan ada lagi masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan anaknya atau anak putus sekolah karena kurangnya biaya pendidikan. Kemudian kebijakan PKH juga bisa dikatakan telah memenuhi kriteria kecukupan apabila dengan adanya bantuan PKH dapat meringankan beban pengeluaran masyarakat, terutama untuk biaya pendidikan.

Bantuan sosial PKH juga mewajibkan peserta PKH komponen pendidikan untuk hadir pada kegiatan belajar minimal 85%. Hal tersebut secara tidak langsung akan membuat anak-anak peserta menjadi lebih rajin belajar. Hasil evaluasi pelaksanaan PKH di Desa Balongmasin dinilai kurang memenuhi kriteria kecukupan. Meskipun bantuan PKH bisa mengatasi masalah biaya pendidikan, tetapi bantuan PKH belum sepenuhnya mengatasi masalah keuangan keluarga. Hal tersebut dikarenakan beberapa peserta lebih memilih berhutang untuk menutupi kebutuhan yang kurang. Padahal jika peserta berhutang juga akan menambah beban keuangan keluarga. Pemenuhan keuangan untuk masa depan bisa berkurang karena harus membayar hutang.

4. Pemerataan

Kriteria pemerataan bisa juga diartikan sebagai keadilan, di mana setiap kelompok sasaran dari kebijakan mendapat hak yang sesuai. Kriteria pemerataan pada pelaksanaan PKH di Desa Balongmasin dapat dilihat pada penyebaran bantuan sosial PKH kepada setiap masyarakat miskin. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PKH di Desa Balongmasin, pelaksanaannya dinilai masih belum memenuhi kriteria pemerataan. Hal tersebut dikarenakan masalah ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan. Pihak desa yang lebih mengerti tentang kondisi di lapangan sering mengeluhkan data dari pusat yang tidak kunjung diperbarui, sehingga masih ada beberapa masyarakat yang tergolong mampu tetapi masih mendapat bantuan sosial PKH. Hal tersebut tentu bisa memicu timbulnya kecemburuan sosial pada masyarakat. Beberapa masyarakat yang tergolong miskin juga pernah melakukan protes kepada pihak desa karena merasa lebih berhak.

5. Responsivitas

Kriteria responsivitas merupakan tanggapan dari kelompok sasaran mengenai kebijakan yang telah dilaksanakan, tanggapan itu bisa berupa respon positif maupun respon negatif. Responsivitas pada pelaksanaan PKH di Desa Balongmasin mendapat respon yang cukup positif dari pihak pelaksana maupun masyarakat peserta PKH. Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum yang dipahami masyarakat tentang bantuan sosial PKH adalah bantuan untuk sekolah anak, kesehatan dan lansia. Mereka memprioritaskan bantuan yang diterima untuk biaya sekolah anak mereka.

Sejak awal menerima bantuan sosial PKH para peserta PKH mengaku senang. Meskipun bantuan yang diberikan bukanlah bantuan penuh, mereka sudah bersyukur karena dengan adanya bantuan bisa meringankan beban pengeluaran keluarga. Mereka juga berharap bahwa bantuan sosial PKH akan berjalan terus. Pihak desa juga berharap bahwa untuk ke depannya pelaksanaan harus lebih diperbaiki terutama masalah data.

6. Ketepatan

Kriteria ketepatan merupakan pernyataan mengenai apakah pemilihan alternatif kebijakan yang dicapai dapat benar-benar bermanfaat bagi kelompok sasaran. Kriteria ketepatan juga menyatakan bahwa pemilihan alternatif yang ditentukan bisa memberikan dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Kebijakan akan dinilai sudah tepat apabila alternatif yang ditentukan memberikan dampak positif. Sedangkan kebijakan akan dinilai kurang tepat apabila alternatif

yang ditentukan malah memberikan dampak negatif, sehingga perlu membuat alternatif baru.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan PKH di Desa Balongmasin dinilai belum memenuhi kriteria ketepatan. Masyarakat memang merasa terbantu dengan adanya bantuan sosial PKH. Bantuan tersebut bisa meringankan beban pengeluaran keluarga. Selain itu, dengan adanya bantuan sosial PKH anak-anak peserta PKH juga memiliki harapan dan kesempatan lebih untuk melanjutkan sekolah, setidaknya sampai lulus SMA. Namun demikian, bantuan yang diberikan belum sepenuhnya bermanfaat untuk peserta. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar peserta PKH masih enggan untuk memanfaatkan bantuan yang mereka terima untuk meningkatkan pendapatan keluarga, misalnya melalui kewirausahaan. Materi yang mereka dapatkan dari kegiatan FDS tentang kewirausahaan masih belum dipraktikkan di rumah. Hanya beberapa termasuk Ibu Susi Lugiawati yang sudah berusaha untuk mencoba membangun dan mempertahankan usaha yang dimiliki. Peserta lain berpendapat bahwa untuk memulai usaha itu sulit. Materi-materi seperti membuat catatan kas harian juga masih belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena sibuk dengan urusan rumah tangga. Padahal jika masyarakat mampu merubah pola pikir menjadi lebih maju, mereka akan berusaha memanfaatkan bantuan yang diterima agar kemudian bisa menambah pendapatan keluarga. Dengan demikian, mereka bisa segera keluar dari garis kemiskinan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dari pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH dilihat dari efektivitas kebijakan menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Balongmasin masih kurang efektif. Bantuan sosial PKH dinilai masih belum mampu mengurangi kemiskinan. Kemudian meskipun hampir semua peserta selalu hadir pada kegiatan FDS, tetapi masih terdapat beberapa peserta tertentu yang sering tidak hadir. Pelaksanaan PKH dilihat dari efisiensi kebijakan menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Balongmasin belum cukup efisien karena tidak adanya jadwal yang terstruktur untuk kegiatan FDS.

Pelaksanaan PKH berdasarkan kecukupan kebijakan menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Balongmasin belum cukup mengatasi masalah yang ada. Beberapa masyarakat lebih memilih berhutang untuk memenuhi kebutuhan. Pelaksanaan PKH berdasarkan kriteria pemerataan kebijakan dinilai kurang merata. Hal

tersebut dikarenakan masalah ketidaksesuaian data dengan kondisi di lapangan. Masih terdapat beberapa masyarakat yang tergolong mampu tetapi masih mendapat bantuan PKH. Pelaksanaan PKH berdasarkan kriteria responsivitas kebijakan menunjukkan bahwa adanya bantuan sosial PKH mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Mereka merasa puas karena dengan adanya bantuan sosial PKH. Sedangkan pelaksanaan PKH berdasarkan kriteria ketepatan menunjukkan bahwa PKH dinilai masih belum tepat. Beberapa edukasi dalam kegiatan FDS dinilai kurang bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga jarang yang mempraktikkan edukasi kewirausahaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran terkait evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balongmasin Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya simulasi langsung tentang edukasi kewirausahaan agar masyarakat lebih tertarik untuk mempraktikkannya, sehingga ke depannya bisa meningkatkan perekonomian keluarga.
2. Perlu adanya inovasi penyampaian materi dalam kegiatan FDS agar tidak terkesan membosankan.
3. Perlu adanya jadwal yang terstruktur untuk kegiatan FDS, tanggal berapa dan jam berapa kegiatan akan dilaksanakan.
4. Perlu adanya pembaruan data peserta PKH yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal tersebut tentu untuk pemerataan bantuan sosial agar benar-benar diberikan kepada yang lebih berhak dan juga untuk mengurangi adanya kecemburuan sosial pada masyarakat.
5. Perlu adanya inovasi mengenai materi-materi yang disampaikan agar lebih bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan untuk kehidupan sehari-hari peserta.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini, di antaranya:

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
2. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing.
3. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. dan Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., M.A. selaku dosen penguji.
4. M. Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.

5. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, Deylia Carolina. 2016. "Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Partisipasi Wajib Belajar 9 Tahun Bagi Anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kecamatan Sooko". *Jurnal Paradigma*, Vol. 4, No. 1.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Islamy, Muh. Irfan. 2014. *Kebijakan Publik: Definisi dan Makna Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Apa Itu Program Keluarga Harapan*, Diakses pada 9 Januari 2019, dari <https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1>
- Pemerintah Republik Indonesia. 2017. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia
- Kompas. 2008. Tiga Kecamatan di Mojokerto Target PKH, Diakses pada 9 Januari 2019, dari <https://regional.kompas.com/read/2008/12/31/0109548/Tiga.Kecamatan.di.Mojokerto.Target.PKH>
- Pemerintah Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 01 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Purwanto, Slamet Agus, dkk. 2013. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)". *Jurnal Wacana*. Volume 16 (2), 79-96.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwinta, Antriya Eka. 2016. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.